



Analisis Tanggung jawab Negara Malaysia atas Respon Nota Diplomatik Terhadap Penembakan WNI di Selangor

Fadhilatul Amaliya¹, Dwi Lestari², Alya Khoyrunisa³, Anisa Mutiara Rizky⁴, Faishal Hasyim⁵

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id, dwi.lestari@students.untidar.ac.id

alya.khoyrunisa@students.untidar.ac.id, anisa.mutiara.rizky@students.untidar.ac.id, faishal.hasyim@students.untidar.ac.id

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of Indonesia's diplomatic efforts in responding to the shooting of Indonesian citizens by Malaysian authorities in Selangor, which is perceived as a violation of human rights. The objective is to evaluate Malaysia's accountability and how diplomatic mechanisms function in resolving such international disputes. The research employs a normative juridical method based on literature review, news reports, and legal references. Findings reveal that Indonesia has undertaken formal diplomatic steps, including official protest notes, legal support through the Indonesian Embassy, and direct bilateral communication. However, Malaysia's response remains normative, lacking in transparency and legal accountability. Malaysia's non-responsiveness negatively impacts bilateral relations, public trust, and overall human rights protection. On the other hand, a cooperative stance from Malaysia would strengthen bilateral ties and improve protection mechanisms for migrant workers. This study highlights Indonesia's limited diplomatic influence in demanding accountability and emphasizes the need for transnational cooperation in addressing human rights violations.

Keywords: Diplomacy, Human Rights, Indonesia, Malaysia, Migrant Workers

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas tindakan diplomatik Indonesia dalam merespons kasus penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Malaysia di Selangor yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Malaysia atas insiden tersebut dan bagaimana mekanisme diplomatik dapat digunakan sebagai alat penyelesaian sengketa internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum, berita, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah diplomatik berupa pengiriman nota protes resmi, pendampingan hukum melalui KBRI, serta komunikasi bilateral intensif. Namun, respons Malaysia bersifat normatif dan tidak menunjukkan transparansi maupun akuntabilitas hukum yang memadai. Tindakan Malaysia yang tidak responsif memunculkan implikasi negatif bagi hubungan bilateral, kepercayaan publik, dan perlindungan HAM secara umum. Sebaliknya, jika Malaysia kooperatif, hal ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan memperbaiki mekanisme perlindungan pekerja migran. Penelitian ini menyoroti keterbatasan diplomasi Indonesia dalam mendorong akuntabilitas dan pentingnya kerja sama lintas negara dalam isu HAM

Kata Kunci: Diplomasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Malaysia, Pekerja Migran

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi keanekaragaman budaya, sumber daya alam dan merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya SDA saja yang melimpah namun, sumber daya manusia yang padat menjadikan negara Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Tidak jarang sebagian masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri untuk bekerja mencari penghasilan. Salah satunya ialah negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara yang berdekatan dengan Indonesia jarak tempuh kedua negara ini cukup cepat. Maka dari itu, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Negara Malaysia. Di Lain sisi, Malaysia memiliki penawaran terhadap calon pekerja yang akan bekerja di negaranya seperti menawarkan untuk pekerja migran dengan gaji yang dapat dikatakan lebih tinggi daripada Negara Indonesia.

Hubungan yang terus terjalin ini akan memicu dan menimbulkan ketergantungan antara kedua negara baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Semua aspek hubungan yang dijalin oleh Indonesia dengan Malaysia ini sangat kompleks. Dengan adanya kekompleksitasan ini, akan mendatangkan rasa kepercayaan yang baik. Seiring dengan terus berkembangnya hubungan antara kedua negara ini tetap saja akan muncul rasa ketegangan yang terjadi entah dalam bentuk diplomatik, dari segi ekonominya, politik, pertahanan, antara penduduknya. Salah satunya baru baru ini negara Indonesia dikejutkan dengan berita yang kurang mengenakan pasalnya terkait adanya aksi tindakan aparat Malaysia yang menembak pekerja migran Indonesia dapat dinilai melanggar HAM. Sorotan atas tanggung jawab negara malaysia ini harus diselesaikan dengan baik dan terstruktur, dimana aspek penting dalam penyelesaian kasus internasional tidak terlepas dari adanya peran hubungan internasional yang dimana hubungan internasional kedua negara ini dapat diwakilkan oleh duta besar maupun seorang diplomat. Tugas atas hubungan internasional ini jika dikaitkan dengan kasus penembakan warga negara indonesia di Selangor merupakan hal paling *urgen* yang harus ditempuh indonesia. Salah satu hal paling menyorot ialah dimana indonesia telah mengirim nota diplomatik dengan tujuan untuk merespon atas pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga negara indonesia.

Terkait sorotan kasus pada pekerja migran non prosedural yang bertempat di negara Malaysia menjadi berita kasus janggal. Pasalnya, pekerja migran non prosedural itu telah ditembak. Dalam penembakan tersebut, 5 orang menjadi korban. Satu diantaranya meninggal dunia. Maka dari itu, adanya kasus demikian akan menimbulkan suatu stigma pro dan kontra antara kedua negara. Arah pertanyaan besar ini akan mengarah pada hubungan yang terjalin dari Indonesia dan Malaysia atas hubungan bilateral. Tidak hanya itu, terkait penembakan pada korban akan sangat rentan dalam mengaitkan terhadap perlindungan HAM.

Menyoroti atas kasus telah tersorot semua aspek lapisan mulai dari Presiden, dubes, bahkan kemlu. Kasus penembakan warga negara indonesia di Malaysia ini juga ditanggapi oleh pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan bahwa adanya pengakuan yang diutarakan oleh korban seharusnya

dilakukan sumpah supaya memiliki kekuatan hukum yang sah bahkan dapat mengikat secara resmi. Berdasarkan telaah dan kajian kasus yang tersaji, terlintas antara negara Indonesia dan Malaysia menjadi bahan bincang masyarakat internasional, apalagi kasus yang melibatkan hubungan diplomatik kedua negara pun akan menjadi pertanyaan besar. Salah satunya para praktisi akademisi, mahasiswa dapat mempelajari arah pembahasan kasus yang mencakup hubungan internasional, hubungan diplomatik, maupun hubungan konsuler dari kedua negara yang bersangkutan.

Dalam pengumpulan data data di lapangan, untuk merangkum dan menemukan bahan dasar yang utuh digunakan untuk bahan rujukan penelitian mahasiswa hukum terkait hubungan diplomatik yang berkelanjutan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Penuangan atas penelitian yang akan dipublikasikan secara nasional diharapkan dapat menyajikan data data relevan. Dalam proses investigasi yang dilakukan Negara Indonesia melalui nota diplomatik atas penembakan WNI di Selangor, penelitian ini bertujuan untuk mengulik tanggung jawab negara Malaysia supaya dalam merespon nota diplomatik negara Malaysia dapat menyelesaikan secara profesional dan jelas. Agar tuntutan yang diajukan negara Indonesia dapat menjadi salah satu harapan pemenuhan keadilan bagi WNI tersebut.

Melalui analisis secara komprehensif atas adanya data data yang dirangkum menjadi satu, penulis dapat menuangkan konsep dalam satu dimensi hubungan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral yang akan dijadikan rujukan bahan pertimbangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam konteks hubungan negara yang sedang dihadapkan sengketa kasus, penulis meninjau terkait norma- norma, hukum kebiasaan internasional, aspek hukum internasional, maupun dalam penelitian ini mampu menuangkan secercah kontribusi yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang berkelanjutan bagi masyarakat maupun para mahasiswa dalam melakukan riset pendekatan hubungan internasional yang mengarah pada hubungan diplomatik antar negara maupun hubungan konsuler supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis yuridis normatif melalui studi pustaka dan bahan literatur lain yang bersumber dari jurnal, berita, dan dokumen yang relevan, dengan fokus pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini didasarkan pada kebiasaan umum hukum internasional, praktik umum hubungan diplomatik, dan personalitas internasional, yang mencakup hak diplomat Indonesia dalam mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia terkait kasus penembakan WNI di Selangor. Pemilihan isu penelitian disesuaikan dengan relevansi dalam konteks hukum diplomatik, memanfaatkan pendekatan ilmu hukum internasional untuk menganalisis isu diplomatik yang muncul. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian literatur dari platform digital, termasuk media sosial yang berbasis

informasi formal yang diakses publik, sehingga keaslian dan keformalannya dapat diuji melalui sumber berita resmi antar negara. Seluruh data tersebut disusun dalam kerangka hukum internasional, dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, dan dikritisi secara akademis untuk mendukung perkembangan kebijakan dan aturan yang berlaku dalam hubungan bilateral maupun multilateral, yang diwakili oleh diplomat melalui hubungan diplomatik dan konsuler.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis tanggung jawab negara malaysia atas respon nota diplomatik terhadap penembakan WNI di Selangor, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Sejauh Mana Efektivitas Tindakan Diplomatik Indonesia Dalam Mendorong Respon Resmi Dan Pertanggungjawaban Malaysia

Hasil penelitian terkait efektivitas tindakan diplomatik Indonesia dalam mendorong respon resmi dan pertanggungjawaban Malaysia. Tindakan diplomatik Indonesia dalam mendorong respon resmi dan pertanggungjawaban Malaysia atas insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) di Selangor telah dilakukan melalui berbagai mekanisme formal, namun efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara aktif menyampaikan nota diplomatik yang berisi kecaman resmi, permintaan klarifikasi, serta desakan agar Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap aparat yang diduga terlibat. Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur juga aktif melakukan komunikasi langsung dengan otoritas Malaysia dan turut serta dalam upaya pendampingan hukum serta pemantauan proses investigasi di lapangan. Langkah-langkah diplomatik ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menuntut keadilan serta menjamin perlindungan terhadap warganya di luar negeri, khususnya pekerja migran yang kerap menjadi kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM. Meskipun tekanan diplomatik telah dilakukan secara intensif, respon yang diberikan oleh pemerintah Malaysia cenderung normatif, kurangnya transparansi dan tidak disertai dengan tindak lanjut hukum yang tegas terhadap pelaku di lapangan. Namun, tindakan diplomatik tersebut tetap penting sebagai bentuk tekanan politik dan simbol komitmen negara terhadap warganya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam forum bilateral dan regional terkait perlindungan tenaga kerja migran dan HAM.

Tindakan diplomatik yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Selangor, Malaysia, merupakan langkah strategis yang menandai komitmen kuat dari negara dalam melindungi keselamatan dan martabat warganya di luar negeri. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam, karena insiden ini tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dalam sistem hukum dan keamanan di negara penempatan mereka bekerja. Sejak awal, Pemerintah

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera menyampaikan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia yang berisi protes resmi serta permintaan klarifikasi atas tindakan aparat keamanan yang menyebabkan kematian WNI. Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur turut mengambil langkah cepat dengan melakukan investigasi awal, memfasilitasi proses identifikasi jenazah, serta memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada keluarga korban.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia tidak berhenti pada penyampaian nota protes, tetapi juga melibatkan serangkaian dialog bilateral, baik di tingkat Kementerian Luar Negeri maupun antar lembaga penegak hukum kedua negara. Pemerintah Indonesia mendesak agar Malaysia melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel atas insiden tersebut serta memberikan akses kepada perwakilan Indonesia untuk ikut memantau jalannya proses hukum. Dalam sejumlah pernyataan publik, Pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa insiden semacam ini bukan yang pertama kali terjadi, dan oleh karena itu diperlukan reformasi struktural dalam pendekatan keamanan terhadap tenaga kerja asing di Malaysia, khususnya yang berasal dari Indonesia. Indonesia juga mendorong agar Malaysia memberikan jaminan hukum yang adil dan menghukum aparat yang terbukti bersalah, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas diplomasi Indonesia dalam kasus ini mengalami hambatan yang cukup besar. Meskipun nota diplomatik telah dikirim dan tekanan politik secara halus telah disampaikan, respon dari pihak Malaysia dinilai tidak cukup memadai. Pemerintah Malaysia cenderung memberikan jawaban normatif, seperti menyatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan, tanpa memberikan detail konkret atau hasil investigasi yang dapat diverifikasi oleh pihak luar. Tidak adanya transparansi terhadap publik dan lambatnya proses hukum terhadap pelaku menciptakan persepsi bahwa negara tetangga tersebut kurang serius dalam menangani kasus pelanggaran terhadap WNI. Dalam hal ini, diplomasi Indonesia tampaknya mengalami keterbatasan, terutama dalam menghadapi sikap defensif negara penempatan yang berusaha menjaga citra dan kedaulatannya di tengah tekanan dari luar.

Meski Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan historis, budaya, dan ekonomi yang kuat, dalam isu perlindungan pekerja migran, Indonesia sering kali berada dalam posisi yang lebih subordinat (bawahan). Malaysia sebagai negara tujuan utama tenaga kerja Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap kelangsungan pasokan tenaga kerja murah, namun dalam waktu yang sama, mekanisme perlindungan terhadap tenaga kerja asing belum sepenuhnya berjalan dengan standar yang ditetapkan oleh hukum internasional. Ketimpangan ini membuat negosiasi diplomatik dalam kasus seperti penembakan WNI seringkali terjebak dalam dilema antara menjaga hubungan baik dan menuntut keadilan secara tegas. Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas hubungan bilateral sambil tetap mengupayakan keadilan dan akuntabilitas yang sejati atas insiden-insiden kekerasan yang menimpa warganya.

Tindakan diplomatik Indonesia tetap memiliki nilai strategis dan simbolik yang penting. Protes resmi, dialog bilateral, dan keterlibatan aktif KBRI mencerminkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kekerasan terhadap warganya. Tindakan-tindakan ini juga memberikan tekanan politik kepada pemerintah Malaysia untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi isu pekerja migran. Selain itu, diplomasi semacam ini menjadi bagian dari dokumentasi internasional yang dapat digunakan Indonesia dalam forum multilateral seperti ASEAN, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Dewan HAM PBB untuk menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan lintas negara terkait tenaga kerja migran.

Sebagai bagian dari upaya memperluas tekanan moral dan institusional terhadap Pemerintah Malaysia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) turut mengambil peran aktif dalam mendorong pengawasan independen terhadap kasus penembakan WNI di Selangor. Kemenkumham secara resmi mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) agar menjalankan fungsi pemantauannya terhadap kasus ini secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang Malaysia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia universal. Selain itu, Kemenkumham juga mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) untuk menjalin koordinasi erat dalam rangka membangun solidaritas antar lembaga HAM di kawasan. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum regional seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), guna mendorong akuntabilitas atas kekerasan terhadap warga negara dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan tidak hanya dijalankan melalui jalur politik dan diplomatik formal, tetapi juga melalui jaringan kerja sama antar institusi HAM lintas negara yang dapat memberikan tekanan tambahan serta membuka ruang dialog konstruktif antar masyarakat sipil di kedua negara.

Dengan demikian, meskipun diplomasi Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam mendorong pertanggungjawaban resmi dari pihak Malaysia, upaya yang dilakukan menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk di luar wilayah yurisdiksinya.

Sejauh Mana Efektivitas Mekanisme Diplomati Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Menyelesaikan Sengketa Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap WNI Dalam Kasus Penembakan WNI Di Selangor

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang erat, terutama dalam kedekatan geografis, kemiripan budaya, serta banyaknya WNI yang mengadu nasibnya di Malaysia. Hubungan ini menimbulkan adanya dinamika ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi manusia yang sering menjadi sumber

sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Seperti pada kasus penembakan WNI di Selangor oleh aparat Malaysia yang dimana kasus tersebut dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Penembakan ini terjadi karena adanya dugaan bahwa WNI yang ditembak terlibat dalam aktivitas kriminal di Malaysia, namun aparat Malaysia melakukan penyiksaan terhadap WNI tersebut di luar proses hukum yang ada yang tentunya jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak cukup hanya memprotes pihak Malaysia namun juga harus mengevaluasi sistem perlindungan HAM serta memperbaiki hubungan bilateral dengan Malaysia agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Adanya kasus ini pemerintah Indonesia dengan cepat mengambil langkah diplomatik dengan cara mengirimkan nota protes resmi terhadap pihak Malaysia. Tak hanya berhenti dengan menyampaikan nota protes resmi kepada Malaysia, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu yang bekerjasama dengan KBRI juga melakukan penelusuran langsung di lapangan dan memastikan perlindungan hukum bagi korban dan keluarganya. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan koordinasi dengan lembaga nasional seperti LPSK dan BP2MI guna membantu mencari bukti dan fakta dibalik kematian korban penembakan oleh aparat Malaysia di Selangor ini. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media serta pernyataan resmi dari pemerintah untuk dapat menekan pemerintah Malaysia agar menempuh penyelidikan secara independen dan transparan.

Melalui mekanisme yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia, kasus ini berhasil menjadi sorotan dan mendapat perhatian luas di media serta forum kedua negara, yang membuat pihak Malaysia merespons dengan pernyataan resmi meskipun tidak menyeluruh sehingga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam proses penyelesaian kasus ini. Sangat disayangkan kepada pemerintah Malaysia yang tidak melakukan proses penyelesaian secara independen dan transparan, melainkan hanya menyampaikan narasi sepihak, tanpa ada proses hukum bagi aparat yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini respon Malaysia juga dianggap tidak cukup memadai, selain hanya memberikan narasi sepihak dan tidak menyeluruh, Malaysia tidak memberikan sepenuhnya wadah untuk melakukan investigasi bersama antara Indonesia dan Malaysia sehingga kasus penembakan WNI di Selangor tidak sepenuhnya terungkap. Malaysia juga tidak melakukan kompensasi atau mengakui kesalahannya yang menimbulkan keadilan bagi korban dan keluarga tidak tercapai. ASEAN yang dianggap sebagai wadah regional juga tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena adanya prinsip non-intervensi yang dianut oleh organisasi tersebut yang membatasi ruang diplomasi multilateral.

Melihat Malaysia dalam merespon langkah diplomatik pemerintah Indonesia dalam kasus penembakan WNI di Selangor tidak menunjukkan respon yang tanggap, independen, dan transparan, rasanya mekanisme diplomatik dalam penyelesaian kasus ini masih kurang efektif dan tergolong terbatas dengan ketiadaan hasil yang pasti atas pelanggaran HAM yang terjadi, tidak adanya investigasi yang independen dari pihak Malaysia, pertanggungjawaban hukum yang nihil, dan kurangnya pemulihan hak korban yang menunjukkan bahwa

diplomasi Indonesia belum mampu dan belum cukup kuat dalam menegakan prinsip Hak Asasi Manusia di tingkat bilateral. Tantangan dari kurang efektifnya mekanisme diplomatik dalam kasus ini yakni lemahnya posisi negosiasi diplomasi Indonesia dalam isu HAM dan adanya prinsip non-intervensi dalam hubungan regional ASEAN. Namun disamping itu Indonesia telah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam dan berusaha menjaga konstitusionalnya dalam melindungi warga negaranya, meskipun belum sepenuhnya berhasil.

Implikasi Respon Atau Ketidak Responan Malaysia Terhadap Nota Diplomatic Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara

Nota diplomatik yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan WNI di Selangor telah mendapatkan respon dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia mengungkapkan akan memberikan akses informasi yang luas dan transparan kepada pihak Indonesia mengenai kasus tersebut, serta mengizinkan pertemuan antara Polri di KBRI Kuala Lumpur dengan Kepolisian Diraja Malaysia untuk membahas tindak lanjut kasus ini. Aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang diduga melakukan penembakan telah dinonaktifkan untuk memudahkan proses penyelidikan oleh polisi Malaysia. Terkait kejadian ini terdapat pula satu WNI yang ditahan oleh kepolisian Selangor, namun KBRI di Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran atas penangkapan tersebut. KBRI telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk meminta penjelasan dan akses kekonsuleran terkait penahanan WNI tersebut.

Respon Malaysia terhadap nota diplomatik yang telah dikirimkan Indonesia dalam kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap hubungan bilateral kedua negara baik dari sisi diplomasi, hukum, perlindungan WNI hingga persepsi publik. Implikasi positif apabila Malaysia merespon nota diplomatik Indonesia yaitu dapat memperkuat kepercayaan dan kerjasama bilateral antar kedua negara, keterbukaan akses informasi dan transparansi dalam penanganan kasus ini memperlihatkan itikad baik dalam menjaga hubungan bilateral yang selama ini sensitif terutama mengenai isu pekerja migran. Akses kekonsuleran yang diberikan Malaysia memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memastikan hak-hak WNI terpenuhi, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai standar HAM internasional. Adanya kerjasama yang kooperatif antara Malaysia dan Indonesia juga dapat meredam potensi ketegangan diplomatik sehingga mencegah eskalasi isu menjadi konflik yang lebih besar di ranah internasional. Respon Malaysia yang kooperatif ini dapat membuka peluang dialog terkait perbaikan mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Sebaliknya ketidak responan Malaysia terhadap nota diplomatik dapat menimbulkan implikasi negatif seperti menurunnya tingkat kepercayaan dan citra Malaysia di mata publik yang dapat menyebabkan ketegangan diplomatik serta berdampak pada kerjasama bilateral di bidang lain. Ketidak Respons Malaysia juga

berpotensi memicu kritik tajam dari masyarakat sipil, LSM maupun pihak terkait yang menuntut perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, tidak responan Malaysia terhadap kasus ini dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia atau dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan hukum dalam ranah internasional. Isu HAM merupakan isu sensitif sehingga ketidak responan Malaysia juga berpotensi menyebabkan tekanan dari komunitas eksternal dan berisiko menghadapi isolasi diplomatik dari Indonesia terutama dalam kerjasama bilateral terkait pekerja migran dan bidang lain yang selama ini sensitif.

SIMPULAN

Kesimpulan, tindakan diplomatik Indonesia dalam mendorong respon resmi dan pertanggungjawaban Malaysia atas insiden penembakan WNI di Selangor telah dilakukan melalui berbagai mekanisme formal, seperti penyampaian nota protes dan dialog bilateral di tingkat kementerian dan lembaga penegak hukum, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala. Meski Malaysia menyatakan komitmennya untuk memberikan akses informasi dan membahas tindak lanjut kasus ini, responnya cenderung normatif tanpa detail konkret yang dapat diverifikasi, sehingga menghambat kejelasan dan akuntabilitas hukum. Lemahnya posisi negosiasi Indonesia dalam isu HAM serta prinsip non-intervensi ASEAN turut menjadi tantangan dalam memaksimalkan hasil diplomasi. Implikasi positif muncul jika Malaysia merespon nota diplomatik secara terbuka, yang dapat memperkuat kepercayaan dan kerjasama bilateral, sementara ketidakresponsifan Malaysia berpotensi memicu kritik tajam dari masyarakat sipil dan dianggap sebagai pengabaian prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Kompas.id. (2025, January 26). *Kasus penembakan WNI, pemerintah RI kirim nota diplomatik pada Malaysia.* [Kompas.id.
https://www.kompas.id/artikel/kasus-penembakan-wni-pemerintah-ri-kirim-nota-diplomatik-pada-malaysia](https://www.kompas.id/artikel/kasus-penembakan-wni-pemerintah-ri-kirim-nota-diplomatik-pada-malaysia)
- CNN Indonesia. (2025, February 3). *RI protes ke Malaysia soal penangkapan WNI terkait penembakan Selangor.* [CNNIndonesia.com.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250203172854-106-1194109/ri-protes-ke-malaysia-soal-penangkapan-wni-terkait-penembakan-selangor](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250203172854-106-1194109/ri-protes-ke-malaysia-soal-penangkapan-wni-terkait-penembakan-selangor)
- Kompas.com. (2025, January 26). *Buntut 5 WNI ditembak aparat Malaysia, Kemenlu bakal kirim nota diplomatik.* [Kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2025/01/26/20282931/buntut-5-wni-ditembak-aparat-malaysia-kemenlu-bakal-kirim-nota-diplomatik](https://nasional.kompas.com/read/2025/01/26/20282931/buntut-5-wni-ditembak-aparat-malaysia-kemenlu-bakal-kirim-nota-diplomatik)
- Karosatuklik.com. (2025, January 27). *Penembakan WNI di Selangor, Kemlu kirim nota diplomatik.* [Karosatuklik.com.](https://www.karosatuklik.com)

- <https://karosatuklik.com/penembakan-wni-di-selangor-kemlu-kirim-nota-diplomatik>
- Universitas Gadjah Mada. (2025, Januari 29). *Tindakan aparat Malaysia tembak migran Indonesia dinilai melanggar HAM*. UGM.ac.id. <https://ugm.ac.id/id/berita/tindakan-aparat-malaysia-tembak-migran-indonesia-dinilai-melanggar-ham/>
- Kompas.id. (2025, Januari 27). *Keterangan aparat Malaysia soal penembakan WNI berbeda, Kuala Lumpur diminta transparan*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/keterangan-aparat-malaysia-soal-penembakan-wni-beda-beda-kuala-lumpur-diminta-transparan>
- Antaranews.com. (2025, Januari 31). *Kemenham desak tanggung jawab hukum Malaysia atas penembakan PMI*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4613370/kemenham-desak-tanggung-jawab-hukum-malaysia-atas-penembakan-pmi>
- Suara Surabaya. (2025, Januari 30). *Kementerian HAM RI desak Malaysia bertanggung jawab atas penembakan pekerja migran Indonesia*. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/kementerian-ham-ri-desak-malaysia-bertanggung-jawab-atas-penembakan-pekerja-migran-indonesia/>
- Tempo.co. (2025, Januari 28). *WNI ditembak di Malaysia, diduga bawa narkoba dan senjata: Ini respons Kemlu*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/internasional/wni-ditembak-di-malaysia-diduga-bawa-narkoba-dan-senjata-ini-respon-kemlu-1204525>
- Dewan Perwakilan Daerah RI. (2025). *Siaran pers DPD RI terkait penembakan WNI di Malaysia*. DPD.go.id. <https://www.dpd.go.id/publikasi/siaran-pers>
- DetikNews. (2025, Januari 29). *Respons Menlu soal ada WNI ditahan terkait kasus penembakan WNI di Malaysia*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7759775/respons-menlu-soal-ada-wni-ditahan-terkait-kasus-penembakan-wni-di-malaysia>
- CNN Indonesia. (2025, Januari 30). *[Video] Respons pemerintah Indonesia atas penembakan WNI di Selangor*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eHxZ3w334FU>
- VOA Indonesia. (2025, 28 Januari). *Penembakan WNI di perairan Malaysia, KBRI Kuala Lumpur kirim nota diplomatik*. <https://www.voaindonesia.com/a/penembakan-wni-di-perairan-malaysia-kbri-kuala-lumpur-kirim-nota-diplomatik/7952209.html>
- Komara, Indra. (2025, 3 Februari). *Indonesia minta Malaysia jelaskan penahanan WNI usai kasus penembakan*. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7761801/indonesia-minta-malaysia-jelaskan-penahanan-wni-usai-kasus-penembakan>
- Nefi, Alfitri. (2025, 28 Januari). *Kemlu beberkan kronologi penembakan WNI di Malaysia, diduga terjadi ancaman dengan parang*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/kemlu-beberkan-kronologi-penembakan-wni-di-malaysia-diduga-terjadi-ancaman-dengan-parang-1199825>